

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masaa.

Pertama masa Republik Indonesia I, yaitua masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang ada pada masa itu dinamai demokrasi parlementer; kedua masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya yang menunjukkan aspek demokrasi rakyat; ketiga masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensil.¹

Setelah masa reformasi kita tahu bahwa banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang Perempuan. Isu-isu seputar Perempuan tidak akan pernah habis

¹ Cory Noviati, “*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*”. Jurnal Konstitusi. Vol. 10 No. 2, 2013, hal. 336.

untuk dibicarakan oleh para pemikir, baik para agamawan maupun pemikir sekuler. Pada abad pertengahan dan era modern telah menghasilkan teori yang berbeda di masyarakat tentang eksistensi kaum Perempuan. Kehadiran kaum Perempuan ditengah-tengah masyarakat memiliki fungsi serta peranan yang sangat penting. Akan tetapi yang terjadi adalah peran penting Perempuan tidak menjadi perhatian lebih sehingga masyarakat tidak menyadari pentingnya peran tersebut. Akibatnya Perempuan bisa menjadi kaum yang termarginalkan.²

Pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum Perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis politik perempuan, dosen, Perempuan parlemen, kader Perempuan partai politik dan lain sebagainya. Sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena Perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap Perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan. Peran Perempuan dalam pembangunan ini dilandasi untuk kepentingan perempuan itu sendiri, adanya tuntutan peran Perempuan dalam Pembangunan menimbulkan pengertian peran ganda atau mitra sejajar, tidak hanya disitu saja Perempuan didorong melangkah ke dunia politik sebagai keterwakilan dari

² Anifatul Kiftiyah, "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia". Vol. 14 No. 1, 2019, hal. 2.

kaumnya dalam mengambil Keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak kaum Perempuan. Akan tetapi, peren tersebut dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik. Saat ini Perempuan masih hanya dalam tahap partisipasi politik saja, seperti hanya sebagai peserta pemilihan umum, namun pada tahap berikutnya Perempuan diharapkan mampu meningkatkan angka keterwakilan Perempuan dalam pemilihan umum yang saat ini masih belum mencapai target yakni 30 persen.

Jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin Perempuan saat ini sebanyak 131,9 juta jiwa, dan Perempuan yang duduk di parlemen hanya 97 orang saja yang mewakili penduduk yang berjenis kelamin Perempuan dan 17,3 persen dari total keseluruhan anggota DPR RI. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan : menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan keterwakilan Perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi Perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen, tentu harus adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap Perempuan itu sendiri agar terangsang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar mampu meningkatkan keterwakilan Perempuan di parlemen.³

³ Riski Priandi dan Kholis Roisah, "*Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*". Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 107-109.

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang ditetapkan sebagai wilayah kedudukan ibu Kota Provinsi Papua Selatan yang dimekarkan dari Provinsi Papua bersama tiga provinsi lainnya yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Pemekaran provinsi Papua Selatan awalnya direncanakan akan terdiri atas lima kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Merauke. Atas dasar pertimbangan wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang kemudian memilih undur diri. ⁴

Bertambahnya penduduk maka secara langsung dapat mempengaruhi kepadatan penduduk per wilayah. Berdasarkan data penduduk yang dibandingkan luas wilayah, diketahui kepadatan penduduk Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021 sebesar 7,27 jiwa/km². Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi terdapat di Kabupaten Mappi yaitu 13,06 jiwa/km². Sedangkan untuk kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu Kabupaten Merauke.⁵

1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk (ribu)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Merauke	122.335	109.361	231.696

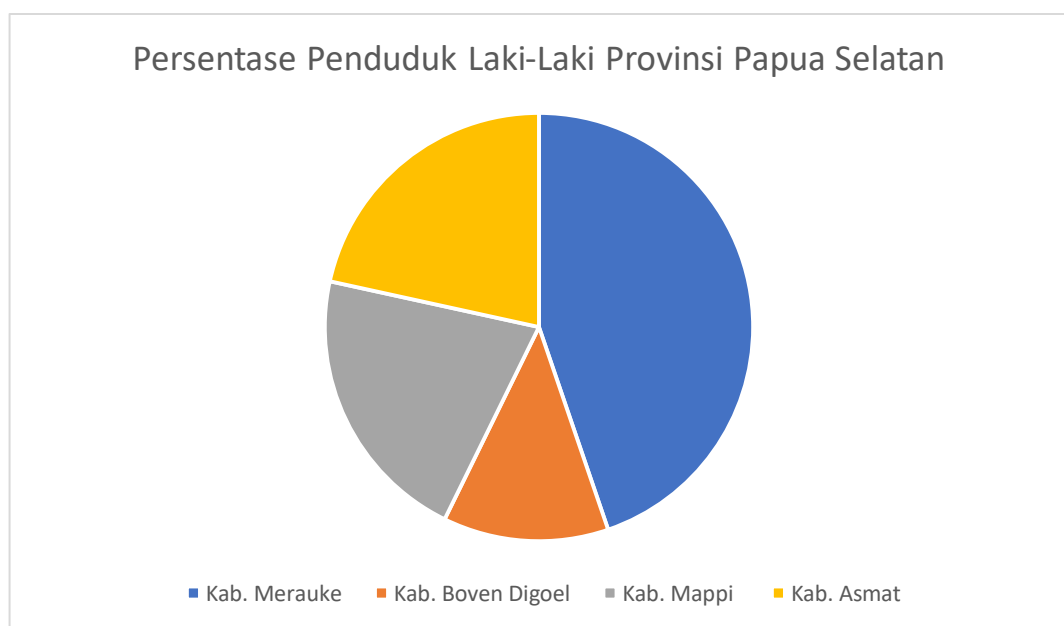
⁴ Pemerintah Provinsi Papua Selatan, “*Sejarah Provinsi Papua Selatan*”, (<https://papuaselatan.go.id/profil/sejarah> , Diakses pada 15 Desember 2024, 08:20)

⁵ Pemerintah Provinsi Papua Selatan, “*Kependudukan Papua Selatan*”, (<https://papuaselatan.go.id/profil/sejarah> , Diakses pada 15 Desember 2024, 08:25)

Boven Digoel	34.170	30.546	64.716
Mappi	57.858	51.721	109.579
Asmat	58.942	52.690	111.632
Total	273.305	244.318	517.623

*Sumber: Pemerintah Provinsi Papua Selatan

1.2 Tabel Persentase Penduduk Laki-Laki Provinsi Papua Selatan



Salah satu bentuk kekhususan Provinsi Papua yakni keberadaan Majelis Rakyat Papua. Dalam UU Otonomi Khusus (Otsus), disebutkan bahwa MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemanyapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam UU Otsus.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Otsus, MRP mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
- b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang di usulkan oleh DPRP;
- c. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diajukan oleh DPRP Bersama-sama dengan Gubernur.
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkur hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Pelaksanaan tugas dan wewenang MRP secara lebih rinci selanjutnya diatut dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). MRP juga memiliki hak-hak yang terdiri dari hak secara kelembagaan dan hak keanggotaan.

Hak lembaga MRP meliputi:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- b. Meminta peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) atau Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- c. Mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRD sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
- d. Menetapkan peraturan tata tertib MRP

Sementara itu, hak anggota MRP terdiri dari:

- a. Mengajukan pertanyaan;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Imunitas;
- d. Protokol; dan
- e. Keuangan/administrasi.⁶

⁶ A. Sakti R.S. Rakia, "Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus". Jurnal Justisi Vol. 7, No. 1, Hal 18-19

Kehadiran MRP di Provinsi Papua, jika diamati melalui latar belakang Undang-Undang Otsus Papua, diakui merupakan suatu lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang amat berarti. Meskipun sebagai lembaga kultural dan tidak memiliki fungsi legislasi, namun MRP sebetulnya tiak jauh berbeda dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang sama-sama sebagai lembaga perwakilan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang diwakilinya. Secara politis, kedua lembaga tersebut sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat, hanya saja keduanya memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Jika DPRP selama ini sebagai lembaga politik, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas, naming MRP sebuah lembaga kultural yang secara khusus memperjuangkan masyarakat asli Papua. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (5) UU Otsus Papua, dimana MRP berfungsi untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli papua, serta memfasilitasi tingkat lanjut penyelesaiannya.⁷

1.3 Tabel Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Merauke 2024

Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Kel/Kamp	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Merauke	22	190	86.170	81.937	168.107

*) Sumber: KPU Provinsi Papua Selatan (diolah dan dikaji oleh penulis)

⁷ Ode Jamal dan Senalince Mara, “Politik Kewargaan Multikulturalisme (Studi Kasus Tentang Peran Majelis Rakyat Papua dalam Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Adat Papua Era Otonomi Khusus)”, Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, hal. 157-158.

1.4 Tabel Pengguna Hak Pilih Kabupaten Merauke 2024

Kabupaten	Pengguna Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan
Merauke	54.241	56.400

*) Sumber: KPU Provinsi Papua Selatan (diolah dan dikaji penulis)

Selama ini selalu kita lihat bahwa partisipasi politik perempuan memiliki angka yang cukup signifikan rendah dibandingkan dengan partisipasi politik laki-laki. Namun pada penelitian ini penulis melihat bahwa pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan justru tingkat partisipasi politik perempuan memiliki angka yang lebih tinggi dengan presentase 33,55% sedangkan laki-laki memiliki presentase 32,26% dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke. Dengan jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan namun memiliki partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah yang lebih rendah dibandingkan perempuan menjadi faktor utama mengapa penulis ingin melihat dan mengkaji lebih dalam lagi apa yang membuat partisipasi laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilu yang berkala juga menjadi prasyarat sistem politik demokrasi karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Papua tidak hanya terjadi pada Kabupaten Merauke saja yang terjadi secara verbal atas dasar tindakan ancaman. Namun, pada Kabupaten Mamberami Tengah, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Puncak Jaya juga terjadi kekerasan sampai pada dengan memakan sejumlah korban Jiwa. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ignatus Benny Ady Prabowo menjelaskan bahwa bentrok yang terjadi antar massa terkait pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah ini merupakan masa pendukung calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 1 dengan massa pendukung pasangan calon nomor urut 2 di Kantor KPU Puncak Jaya. Bentrokan yang terjadi di halaman Kantor KPU Puncak Jaya ini melua hingga ke perempatan Kios Jimmy dan jalan ke arah kompleks Kuburan 7. Benny menyampaikan bahwa masa kedua kubu ini saling melemparkan umpatan yang berujung saling serang fisik menggunakan alat perang berupa busur pana, serta parang di daerah Distrik Irimuli. Pada kerusuhan pertama yang terjadi di Distrik Irimuli berhasil dilerai oleh aparat keamanan namun terjadi lagi aks susulan antara kedua massa ini yang menyebabkan 40 unit rumah dan 1 honai terbakar, terdapat 94 orang luka-luka terkena panah.⁸

Untuk memperkuat pemahaman penulis, melihat dari penelitian sebelumnya yaitu dari Juan Kahlil Gandeguay yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan Dalam pemilihan Kepala Daerah Di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama,

⁸ Theo Kelen, “Sejumlah Insiden Terjadi Saat Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024 di Tanah Papua”, (<https://jubi.id/polhukam/2024/sejumlah-insiden-terjadi-saat-pemungutan-suara-pilkada-serentak-2024-di-tanah-papua/>), diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 10:26)

masyarakat kabupaten Mimika mengalami ketidakpercayaan pada calon kepala daerah dikarenakan tidak adanya kesejahteraan atau sumbangsih yang signifikan dari kepala daerah sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat menjadi enggan untuk memberikan hak suaranya kepada calon kepala daerah. Kedua, masyarakat tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak dapat memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan kepala daerah. Dikarenakan, pekerjaan merupakan suatu hal yang penting dan apabila ditinggalkan dapat mengganggu kebutuhan pokok masyarakat. Ketiga, masyarakat tidak mendapatkan hak suara atau masyarakat tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap.

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, yang membedakan penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah, pada penelitian terdahulu penulis hanya membahas mengenai partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Mimika. Sedangkan, penelitian ini penulis membahas mengenai Partisipasi Pemilih Laki-laki di Papua Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Merauke.

Melalui latar belakang inilah penulis hendak melakukan penelitian skripsi di Kabupaten Merauke dengan judul **“Partisipasi Pemilih Laki-laki Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalahnya yaitu mengapa tingkat partisipasi politik laki-laki pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan rendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab rendahnya partisipasi politik laki-laki dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Aspek teoritis, bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan.

Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian ilmiah dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan institusi ilmu politik, memberikan informasi terkait rendahnya partisipasi politik laki-laki dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada pemilihan kepala daerah pada tahun yang mendatang dalam peningkatan partisipasi politik laki-laki di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut

menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, parta politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan memengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter karena sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga daripada aktivitas mandiri.⁹

Kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan, ada pilihan untuk diri sendiri dan pilihan untuk lingkungan sekitar. Setiap individu yang tinggal bersama individu lainnya wajib untuk berpartisipasi menentukan pilihan yang berpengaruh dalam hidupnya maupun lingkungan masyarakat. Berawal dari kajian tentang keterlibatan masyarakat terhdap kegiatan perpolitikan yang sebelumnya terfokuskan hanya ke partial politik yang menjadi ujung tombak pelaksanaan perpolitikan, kini sering

⁹ Ramalan Surbaktim, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal 151

berjalannya waktu terdapat banyak kalangan masyarakat yang tertarik untuk terlibat pada tahapan penyusunan maupun penentuan kebijakan publik.¹⁰

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.¹¹

1.5.2 Bentuk- Bentuk Partisipasi Politik

Teori bentuk-bentuk partisipasi politik yang digunakan peneliti untuk menganalisa temuan penelitian adalah teori yang digunakan oleh P. Huntington, Joan Nelson dan Gabriel Almond, dalam bagian ini penelitian memaparkan beberapa teori bentuk-bentuk partisipasi politik.

P Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya mengemukakan ada beberapa bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan, bentuk partisipasi tersebut yaitu:

a. Kegiatan Pemilihan

Tidak hanya meliputi pemberian dukungan dalam bentuk suara, kegiatan pemilihan ini terdapat berbagai macam jenis yaitu, memberikan dukungan dengan cara berkampanye, mencari dukungan seorang calon, dan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

b. *Lobbying*

¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 367.

¹¹ Ramalan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal 140.

Lobbying merupakan perilaku seseorang atau kelompok agar dapat membuat hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah dan para elit politik dengan maksud mempengaruhi keputusan atau kebijakan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat banyak.

c. Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi ini lebih banyak yang berkaitan dengan partisipasi seseorang dalam mengikuti suatu organisasi yang dengan tujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

d. Mencari Koneksi

Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya yang dimaksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segilintir orang.

f. Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan juga merupakan satu bentuk partisipasi politik, yang biasa digunakan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta beda.¹²

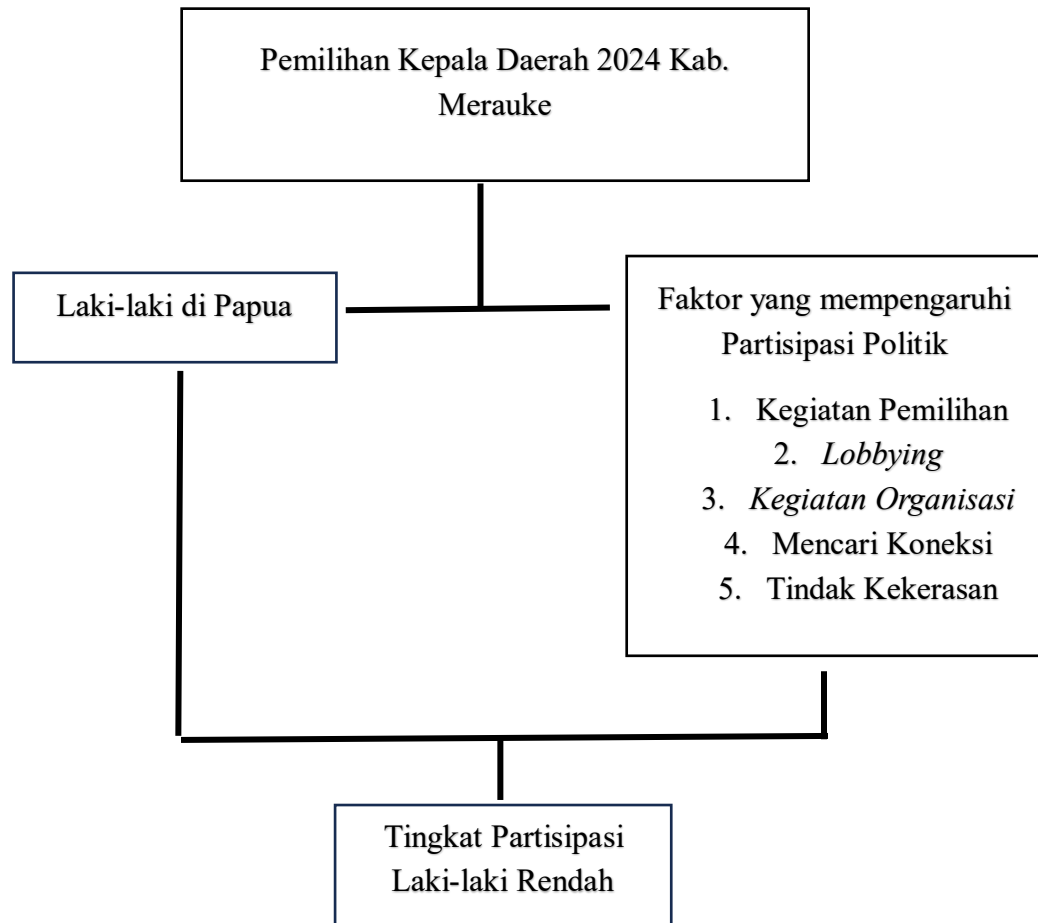
Menurut Rahman dalam bukunya *Sistem Politik Indonesia* kegiatan politik memiliki berbagai macam bentuk partisipasi politik. Perwujudannya di beberapa negara dan periode bisa dikategorikan dalam dua bagian, yaitu aktivitas politik

¹² Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal 16.

konvensional atau non konvensional, baik kegiatan yang sah secara hukum serta yang tidak, dipenuhi tindakan brutal, ataupun yang bersifat revolusi.¹³

¹³ Rahman H. *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 287.

1.6 Kerangka Pikir



Dalam uraian teori yang telah dikemukakan, penulis akan mengkaji tentang partisipasi politik laki-laki dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Penulis akan menggunakan empat aspek partisipasi politik yang terdiri dari : (1) Memberikan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dimana keterlibatan kaum laki-laki dalam proses memberikan suara, keaktifan dan keterlibatan laki-laki dalam pemilihan Kepala Daerah; (2) Menghadiri rapat umum dimana keterlibatan laki-laki dalam panitia pemilihan

menghadiri rapat-rapat kepanitian pemilihan dan juga rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan; (3) Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dimana kegiatan politik dengan masuk menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan tertentu; (4) Mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dimana tindakan aktif laki-laki terhadap tokoh-tokoh masyarakat dengan maksud memperoleh manfaat bagi salah satu tim sukses.

Selain itu akan dikaji pula faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik laki-laki dapat dilihat pada 3 terdiri dari: (1) Kegiatan pemilihan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan hak suara mereka dalam memilih pemimpin sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang dicari oleh masyarakat; (2) Aspek kesadaran politik ini adalah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll; (3) *Lobbying* merupakan suatu aspek yang dilakukan oleh partai politik dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah untuk memberikan pengetahuan serta pengertian akan hak dan kewajiban dalam memberikan suara mereka dalam pemilihan Kepala Daerah untuk menentukan pejabat yang akan memimpin mereka selama masa jabatannya; (4) Mencari Koneksi yang dimaksud ialah suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak; (5) Tindak Kekerasan yang dimaksud ialah ketidakpuasan rakyat terhadap demokratisasi khususnya dalam penyelenggaraan

pemilukada dimulai dari daftar pemilih yang kurang akurat sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, pemilih ganda, persoalan pencalonan misalnya dugaan terhadap penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh calon, pembelian suara secara masif, curi start kampanye, melakukan politik uang menjelang hari H pemungutan suara, penyelenggara pemilukada dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral, sampai dengan kerancuan dalam rekapitulasi penghitungan suara.

Dengan penjelasan di atas maka penulis ingin mengetahui penyebab rendahnya partisipasi pemilih laki-laki dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Dengan aspek-aspek yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas mengapa tingkat partisipasi pemilih laki-laki di Kabupaten Merauke lebih rendah dibandingkan partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Merauke.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan sifat dan karakteristik permasalahannya, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Berikut adalah beberapa definisi penelitian kualitatif yang didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Menurut Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Mulyana mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Menurut Creswell W. menyatakan bahwa *“a qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple meaning meaning of individual experiences, meaning socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative or change oriented) or both”*. Artinya bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan); atau keduanya. Hal tersebut di atas menegaskan bahwa pada penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara,

pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut.¹⁴

Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengungkapkan permasalahan yang sifatnya aktual dan factual, juga bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Partisipasi Pemilih Laki-Laki Papua Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang mengkaji “Partisipasi Pemilih Laki-Laki Papua Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan” ini mengambil Lokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai kota penelitian penulis. Penulis mengambil Merauke sebagai tempat penilitan penulis dikarenakan akses internet yang mudah untuk penulis jangkau dalam melaksanakan penelitian ini.

1.7.3 Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih laki-laki dalam pemilihan kepala daera di kabupaten Merauke.

¹⁴ Feny Rita Fiantika, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal.3-4.

1.7.4 Sumber Data

Data hasil penelitian yang dapat dalam pembuatan kebijakan, bila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi data hasil penelitian lapangan dan data dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa data hasil penelitian yang telah lalu dilakukan peneliti sendiri atau orang lain. Data langsung dari lapangan sering disebut data primer, dan data dokumentasi disebut data sekunder. Bila dilihat dari oemilikan data, data hasil penelitian lapangan maupun dokumentasi dapat di bagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal adalah data hasil penelitian yang berasal dari lembaganya sendiri dan data eksternal adalah data hasil penelitian yang berasal dari luar lembaganya sendiri. Data internal maupun eksternal bila dilihat dari segi waktunya dapat berupa data yang berbentuk *time series*, *cross sectional* dan gabungan.

Data yang berbentuk *time series* adalah data yang dikumpulkan beberapa kai dalam interval waktu yang relatif sama, menggunakan instrument yang sama dan objek yang sama. Pada penelitian eksperimen yang menggunakan desain *time series* akan menghasilkan data yang berbentuk *time series*. Data *cross sectional* adalah data yang dikumpulkan dari objek yang sama atau berbeda dengan isntrumen yang sama atau berbeda dalam interval waktu yang tidak sama. Data gabungan adalah gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross sectional*.

Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, data kualitatif empiris dan data kulitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana danya (tidak diberi makna). Sedangkan, data kualitatif bermakna

adalah data dibalik fakta yang tampak. Penelitian kualitatif yang lebih mendalam banyak berkaitan dengan data kualitatif yang bermakna, oleh karena itu peneliti kualitatif harus mampu memberi makna atau memberi interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh di lapangan secara empiris.¹⁵

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan adalah teknik penentuan informan sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal hal tertentu dalam pengambilan sampelnya. Sedangkan snowball sampling adalah dari jumlah informan yang sedikit kemudian lama lama berkembang menjadi banyak dikarenakan kebutuhan informasi yang lebih spesifik serta lebih banyak. Mungkin dalam proses penelitiannya, penulis memerlukan informasi yang lebih dalam penelitiannya. Misalnya, seseorang yang dianggap sebagai informan kunci ternyata tidak memberikan informasi yang seperti penulis harapkan, untuk itu penulis perlu informan lain untuk mendapatkan informasi yang ditargetkan.¹⁶

Menurut Sugiyono kedua teknik penentuan informan ini termasuk kedalam kategori nonprobability sampling, dalam bukunya dituliskan bahwa “nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Maret 2023 (Bandung;Alfabeta, 2023), hal. 8-9

¹⁶ Muhammad Idrus, Metode., hal. 96-97

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel.”¹⁷

Mencermati begitu luasnya cakupan tentang Partisipasi Pemilih Laki-Laki Di Papua Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan dikomparasikan, maka penelitian ini penulis memilih beberapa informan berdasarkan kriteria diantaranya:

1. Partai Politik yang memiliki peran utama dalam memeberikan ruang dan tempat bagi para laki-laki di papua untuk masuk dan terjun dalam dunia politik terutama pada pemilihan kepala daerah.
2. Masyarakat di Papua khususnya Kabupaten Merauke. Hal ini dikarenakan pentingnya pandangan masyarakat selain staff pemerintah untuk berpendapat dalam mengkomparasikan partisipasi politik bagi laki-laki, serta hal ini sangat potensial akan menambah informasi yang penulis dapatkan.
3. Komisi Pemilihan Umum sebagai instansi penyelenggara serta instansi yang memiliki sumber data utama mengenai pemilih dalam pemilihan umum di Kabupaten Merauke.

Kriteria informan diatas diharapkan penulis mendapatkan informan yang tepat dalam penelitian ini serta dapat menjadikan unit analisis semakin kecil dan lebih fokus.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke 22 (Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 218.

Teknik pengumpulan/pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentative karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang mau diperoleh.

Menurut Denzin dan Lincoln: *the qualitative research as bricoleur uses the tools of historical or methodological trade, deploying whatever strategies, methods, or empirical materials as are at hand*. Dengan kata lain, penelitian kualitatif itu merupakan: *a kind of professional do it yourself person*, yang mengimplikasikan keputusan-keputusan profesional penelitian sesuai dengan konteks permasalahan fakta sasaran penelitian, dan target hasil yang ingin dicapai.¹⁸

Berbagai teknik pengumpulan data itu sebenarnya hanya merupakan “*methodological trade*” yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kepentingan si peneliti. Beberapa teknik pengumpulan data itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.¹⁹

¹⁸ Nursapiah, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 76

¹⁹ Ibid, hlm. 77

Untuk keperluan obeservasi peneliti dapat melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan itu antara lain dalam bentuk:

- a. Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh.
- b. Menentukan sasaran obeservasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan obeservasi pada sasaran tersebut secara lentur.
- c. Melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sasaran sampingan, serta pertalian antara sasaran yang satu dan yang lain sebagai suatu kesatuan.

Peneliti dapat melakukan kegiatan obeservasi secara individual ataupun dapat melakukannya secara kelompok. Dalam pelaksanaannya peneliti bisa melakukannya secara terselubung, secara eksplisit, atau menggabungkan penggunaan teknik observasi ini dengan teknik lain. Misalnya menggabungkan antara wawancara dan catatan lapangan secara analitik. Dalam kegiatan obeservasi terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh peneliti.

- a. Peneliti hanya akan mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan, dan tidak memasukkan sikap dan pendapat pada catatan obeservasi yang dituliskannya. Dengan kata lain, catatan obeservasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini.
- b. Tidak boleh mencatat sesuatu hanya merupakan perkiraan karena memang belum dilihat, didengar, atau dirasakan secara langsung.
- c. Diusahakan agar catatan obeservasi menampilkan deskripsi fakta sejarah holistic, sehingga konteks fakta yang dicatat dipahami.

d. Ketika melakukan obeservasi jangan melupakan target karena bisa sewaktu melakukan obeservasi peneliti menemukan fakta lain yang menarik, tetapi tidak menjadi bagian penelitiannya.

Hasil kegiatan obeservasi bisa berupa catatan atau rekaman atas suatu peristiwa. Dalam melakukan obeservasi peneliti mesti menjaga jarak, guna menghindari dia sebagai bentuk kesalahan secara sistematis yang bisa mempengaruhi pemaknaan yang dilakukannya. Pada sisi lain, peneliti bisa juga terkocek oleh perampatan hasil persepsi akibat penyamarataan terhadap suatu fakta yang secara permukaan kelihatannya sama, tetapi sebenarnya berbeda.²⁰

B. Teknik Interview (wawancara)

Interview/wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Wawancara secara tak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penggunaan teknik wawancara adalah sebagai berikut.

²⁰ Ibid, hlm. 78-79

(a) Menuliskan butir-butir pertanyaannya akan dicari jawabannya, mungkin secara detil atau secara garis besar sesuai dengan bentuk wawancara yang akan dilakukannya.

(b) Memikirkan ulang atau membahasnya bersama teman berkenaan dengan putri pertanyaan yang dipersiapkan.

(c) Menentukan tema interview dan antisipasi kemungkinan informasi yang ingin atau dapat diperoleh.

(d) Memahami dengan benar partisipan dalam kegiatan wawancara, sehingga dapat dijadikan pemandu dalam membuat penafsiran maupun kesimpulan berkenaan dengan informasi yang diberikan.

(e) Tidak menyalahkan pertanyaan pada pemberian jawaban (setuju atau tidak setuju) secara sugestif.

(f) Jangan membiarkan partisipan memberikan jawaban secara panjang lebar yang melampaui batas informasi ataupun topik permasalahan yang seharusnya dibicarakan.

(g) Tidak menginterupsi jawaban dengan pertanyaan yang berbau penafsiran, penggalan pendapat secara subjektif ataupun klarifikasi atas suatu kesimpulan yang memancing munculnya opini.

(h) Menjaga sequence pembicaraan sesuai dengan urutan permasalahan atau konsekuensi informasi yang ingin diperoleh.

(i) Melaksanakan wawancara dengan memanfaatkan bahan rekaman, menciptakan suasana yang segar, menjauhkan suasana pembicaraan dari suasana emosional, sehingga mempengaruhi karakteristik informasi yang seharusnya disampaikan.²¹

C. Teknik Penelaahan Catatan Lapangan & Memo Analitik

Catatan lapangan dan memo analitik merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui obeservasi yang digabungkan dengan interaksi dalam bentuk dialog secara partisipatoris. Dengan cara ini peneliti diharapkan bisa memperoleh sejumlah fakta dan informasi atas sebuah fokus permasalahan yang diperoleh dari berbagai dimensi. Peneliti perlu mencatat tanggal, tempat terjadinya peristiwa/munculnya fakta, dan fokus penelitiannya berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan peneliti melakukan pencatatan. Apa yang dicatat bukan hanya terkait dengan fakta yang dilihat tetapi juga dengan fakta yang diperoleh dari hasil interaksi ataupun wawancara.²²

D. Teknik Elisitasi Dokumen

Penelitian kualitatif bukan hanya merujuk kepada faktor sosial sebagaimana terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi bisa juga merujuk bahan berupa dokumen. Berbagai dokumen itu seperti teks (berupa bacaan, rupa rekaman audio, maupun berupa audio visual). Hal ini biasa dijumpai ketika melakukan penelitian terhadap naskah, karya sastra, dan seni pertunjukan.²³

²¹ Ibid, hlm. 81-83

²² Ibid, hlm. 83

²³ Ibid, hlm. 85

E. Partisipasi Dalam Kaji tindak

Berbeda dengan data yang diambil melalui sejumlah teknik di atas, yang bisa jadi mengacu pada data natural, pengambilan data melalui teknik partisipasi kaji tindak mengacu pada pengambilan data atas hasil intervensi peneliti sebagai praktisi yang telah dipersiapkan peneliti.

Sebelum melakukan pengambilan data peneliti terlebih dahulu Menyusun konsepsi yang dijadikan landasan. Landasan itu sejalan dengan bentuk Tindakan yang akan dilakukan dalam program aksi. Pengumpulan data bisa diambil melalui kegiatan obeservasi, interview, dokumen, maupun hasil kegiatan. Sebagai data yang terkait dengan kaji tindak, tata tersebut pada dasarnya bersifat akumulatif. Jadi akumulasi data tersebut peneliti diharapkan bisa mendapatkan informasi tentang kondisi awal, permasalahan yang muncul, proses tindakan yang dilakukan, keterlibatan kelompok sasaran dalam aktivitas tindakan, hasil tindakan, dan data berkenaan dengan kegiatan tindakan yang dilakukan. Dari serangkaian kegiatan aksi itu, diharapkan peneliti bisa mengetahui/ menunjukkan efek tindakan yang dilakukan.²⁴

Penulis memilih beberapa teknik pengumpulan data kualitatif untuk penelitian ini. Teknik pertama adalah teknik wawancara tatap muka (*face to face interview*). Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara ini merupakan jenis wawancara yang memberi peluang peniliti untuk mengembangkan pertanyaan pertanyaannya dengan tetap memperhatikan fokus pembicaraan.

²⁴ Ibid, hlm. 86-87

Teknik dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data terakhir untuk mendukung dan memperkuat data yang didapatkan selama melakukan penelitian lapangan. Serta sebagai bukti dalam penelitian lapangan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen dalam Ibrahim, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif, yaitu reduksi, display data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Analisis data interaktif ini selalunya merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Miles dan Hubberman, yang terdiri dari kegiatan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusion) antara lain :²⁵

a. Reduksi data

Reduksi Data adalah proses di mana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti coba menyusun data lapangan membuat rangkuman atau ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan

²⁵ *Op.Cit*, Ibrahim, hlm 108 - 111

kategorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus. Dan proses inilah peneliti dapat memastikan mana data-data yang sesuai terkait dan tidak sesuai atau tidak terkait dengan penelitian yang dilakukan.

- b. **Display Data (Penyajian Data)** Display Data diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Sebagai sebuah langkah kerja analisis, display data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan semacamnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan display data dalam analisis kualitatif meliputi langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) yang satu dengan (kelompok) yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini penting disadari mengingat karakter data kualitatif yang beragam perspektifnya dan terasa bertumpuk.
- c. **Penarikan kesimpulan atau verifikasi** Langkah analisis ini biasanya dilakukan sebagai implementasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada, dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Pada tahap ini, peneliti dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada kesimpulan akhir penelitian. Karena itulah tahapan analisis ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian berdasarkan satuan kategorisasi (aspek fokus) maupun pertanyaan utama penelitian (fokus).

Artinya bahwa, proses analisis penelitian dianggap selesai (final) ketika seluruh data yang telah dihasilkan dan disusun telah dapat memberikan jawaban yang baik dan jelas mengenai permasalahan penelitian (fokus).

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Untuk mendapatkan keabsahan data maka penulis menggunakan beberapa teknik pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif, diantaranya :

1. Triangulasi data yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu. Lebih lanjut tentang triangulasi data ada 3 jenis yaitu:²⁶
 - a. Triangulasi sumber dengan menggunakan sumber teori yang berbeda dan dari banyak sumber.
 - b. Triangulasi teknik, dengan menggunakan lebih dari satu teknik/ganda.
 - c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan bertahap dan dalam kurun waktu yang cukup lama.
2. Pengamatan terus menerus dengan melakukan observasi lebih tekun.
3. Membicarakannya dengan orang lain, atau mendiskusikannya dengan orang yang diperkirakan kompeten untuk berdiskusi tentang subjek yang diteliti.²⁷

²⁶ Sugiyono, Metode., hal. 274

²⁷ Muhammad Idrus, Metode., hal. 145-146